

**PENGARUH PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

Oleh: Amir Ahmari dan Syamsul Amar

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Planning, Implementation and Control Budget to Performance Unit (SKPD) in the Mentawai Islands of West Sumatra, and see to what extent the efforts of SKPD make effective and efficient use of the budget. Samples was done by Multi Stage Sampling number 32 on education. Results of the study stated that: Budget planning is a positive and significant impact on the implementation of the budget, planning and implementation of the budget in a positive and significant effect on the control of the budget, Planning, Implementation and Control of the Budget affect positively and significantly related to performance on education in the Mentawai islands County Government, and There are direct and indirect influence of the Planning, Implementation and Control Budget is positive and significant impact on the performance of the Government on education in the Mentawai Islands.

Keywords: Planning, Execution, Control, Performance, SKPD

LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 43 ayat (1)-(3) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah disertai dengan langkah-langkah yang diperlukan. Tahun 2012 merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2011-2016 sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2012.

Jumlah PNS menurut pangkat dan golongan pada masing-masing SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak sebanding dengan kondisi dan luas daerah yang terdiri dari beberapa kepulauan. Untuk menjangkau pulau satu dengan pulau yang lainnya memerlukan transportasi jalur laut. Dengan kondisi geografis tersebut, upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana program kegiatan yang telah ditetapkan sangat sulit untuk diwujudkan. Disamping kondisi geografis, tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatur baik pendidikan formal maupun non formal masih sangat rendah di tambah lagi pengalaman aparatur dibidang pengelolaan kegiatan di tiap-tiap SKPD juga sangat rendah sehingga berdampak negatif terhadap kinerja instansi yang bersangkutan.

Salah satu kebijakan yang harus di tempuh oleh pemerintah daerah adalah menambah jumlah pegawai dan memberikan peluang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan pendidikan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pegawai yang di tempatkan di setiap instansi betul-betul mempunyai skill yang dapat di andalkan.

Jumlah pegawai yang ada didominasi oleh tenaga non teknis yaitu tenaga guru dan

kesehatan. Dengan sedikitnya tenaga teknis tersebut, diduga akan berpengaruh kuat terhadap pencapaian target kinerja SKPD yang telah ditetapkan. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan (skill) dan kualitas sumber daya aparatur dalam mengelola anggaran kegiatan, sehingga akan berdampak kepada tingkat realisasi anggaran yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD.

Realisasi anggaran kegiatan pembangunan pada masing-masing SKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2009-2012 masih banyak anggaran yang belum terealisasi oleh SKPD yang bersangkutan, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 55.65% dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 54.18%, hal ini di sebabkan oleh rendahnya kinerja pegawai, yang menyebabkan hanya sebagian dari anggaran yang di berikan dapat di belanjakan oleh SKDP terkait.

Keseluruhan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari tahun 2009 sampai dengan 2012 terjadi peningkatan dan penurunan yang bervariasi. Pada tahun 2009 dari target anggaran belanja yang ditetapkan, yang dapat direalisasikan sebesar 59,81%, tahun 2010 sebesar 68,86%, tahun 2011 sebesar 64,30% dan tahun 2012 sebesar 78,02%. Hal ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan masih relatif rendah, yang mana tingkat keberhasilan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila realisasi anggaran belanja mencapai > 80%.

Permasalahan yang timbul dalam implementasinya, baik penggunaan anggaran maupun yang di laksanakan oleh SKPD belum efektif dan efisien serta belum menyentuh pada kepentingan publik sehingga dampak dari kegiatan pembelanjaan tersebut tidak terealisasi secara maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan.

Untuk menciptakan pelayanan yang optimal, memerlukan kinerja yang efektif dan efisien, dalam hal ini pemerintah sebagai

pelayan publik harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD dan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam rangka mengawal pencapaian sasaran program pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD beserta penjabarannya maka perlu dilakukan kajian terhadap tingkat capaian sasaran indikator sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD beserta revisinya. Sesuai dengan Pasal 48 ayat (1)-(3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 evaluasi perencanaan pembangunan daerah ini juga akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk tahun berikutnya.

Disamping itu kajian ini juga bermanfaat untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah berdasarkan keluaran dan hasil yang telah direncanakan serta sebagai upaya dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kajian ini juga selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 32 bahwa Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengukuran kinerja mandiri untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai memperlihatkan fakta sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk dikembangkan sebagai basis pembangunan wilayah. Sektor pembangunan yang sangat potensial adalah sektor perikanan, perkebunan,

kehutanan dan pariwisata. Namun potensi sumber daya pembangunan yang dipunyai belum memperlihatkan indikasi kearah optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Buktinya, sektor pertanian termasuk sektor maju tapi tertekan. Namun sub sektor pertanian (perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan) termasuk sub sektor maju dan tumbuh pesat. Hal ini mengandung makna bahwa sub sektor tanaman pangan sangat tertinggal.

2. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap sembilan sektor perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai, ternyata terdapat dua sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan tujuh sektor lainnya merupakan sektor non basis.
3. Sektor pertanian merupakan sektor basis tertinggi. Seluruh subsektor pertanian, kecuali tanaman pangan, merupakan subsektor basis yang turut menyumbang terhadap terbentuknya pertanian sebagai sektor basis. Analisis ini sejalan dengan hasil analisis Tipologi Klassen.
4. Sektor perdagangan, hotel dan restoran juga merupakan sektor basis, basis sektor ini dibentuk oleh subsektor restoran dan subsektor perdagangan besar dan eceran. Sedangkan subsektor hotel tidak merupakan basis (nilai $LQ < 1$).
5. Dengan mengamati perkembangan tahunan dari nilai LQ berdasarkan Sembilan sektor terlihat tidak terdapat perubahan (kenaikan atau penurunan) yang tajam. Tidak terdapat perubahan sektor basis, baik dari sektor non-basis ke sektor basis atau sebaliknya.
6. Secara lebih spesifik masing-masing subsektor yang merupakan basis dengan komoditas atau produk yang mempunyai prospek cukup baik adalah :
 - a) Sub sektor kehutanan dengan komoditas andalan berturut-turut adalah manau, kayu bulat, tabu-tabu dan rotan.

- b) Sub sektor angkutan sungai danau dan perairan (ASDP) serta angkutan laut lainnya.
 - c) Sub sektor kelautan dan perikanan dengan komoditi ikan pelagis besar terutama ikan tuna, udang, dan ikan hias.
 - d) Sub sektor peternakan dengan komoditas babi dan ayam buras.
 - e) Sub sektor perkebunan, komoditas cengkeh, buah pala, kulit kayu manis, merica, dan minyak nilam, kelapa, pisang, dan coklat dan
 - f) Sub sektor perdagangan besar dan eceran, dan restoran.
7. Tingkat capaian kinerja ekonomi sektoral ternyata belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam target RPJMD. Hal ini diduga ada kaitannya dengan realisasi anggaran yang relatif rendah pada setiap tahun anggaran.

Rendahnya realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran disebabkan oleh eksisnya persoalan pada tataran undang-undang dan aturan teknis lainnya yang sering membuat pemerintah kabupaten/kota menghadapi persoalan teknis dalam proses pencarian anggaran. Khusus bagi Kabupaten Kepulauan Mentawai, kondisi geografis wilayah merupakan kendala yang cukup signifikan dalam proses realisasi anggaran program dan kegiatan pembangunan. Potret kinerja pembangunan yang masih relatif rendah diperkirakan berawal dari rendahnya kinerja SKPD tingkat mikro.

KAJIAN TEORI

Kinerja merupakan salah satu bentuk perpaduan antara kemampuan dan usaha untuk memperoleh hasil dari suatu pekerjaan. Untuk mencapai hasil yang baik, seseorang hendaknya memiliki keinginan dan kemampuan, usaha serta bentuk kegiatan yang dilaksanakan dan tidak mengalami hambatan yang berarti di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemauan yang tinggi dan usaha yang besar dapat menimbulkan dan menghasilkan motivasi

yang besar sehingga tertuang dalam kegiatan pelaksanaan (Berry dan Houston, 1993).

Pengukuran kinerja menurut Hansen & Mowen dalam Tangkilisan (2003), didesain untuk menilai seberapa baik aktivitas yang telah dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Menurut Mardiasmo (2002:104) untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sangat diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Kinerja SKPD daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diantaranya dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah, LKPI Kepada DPRD, dan ILPPD Kepada Masyarakat serta lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Kinerja SKPD Daerah sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Pemerintah Daerah yang didalamnya mengandung pengungkapan atau uraian mengenai kinerja pemerintah daerah berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi Daerah (dimuat dalam Nota Perhitungan APBD). Di samping itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mewajibkan pemerintah daerah untuk mengungkapkan uraian prestasi kerja dalam Laporan Realisasi APBD yang pada hakikatnya merupakan pengungkapan dan penilaian kinerja SKPD.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*) (Suharyani dalam Nasir et al, 2003).

Tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur negara termasuk daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan prinsip *good governance*. Menurut UNDP (dalam LAN dan BPKP, 2000:7).

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan di daerah (*social control*).

Pengawasan oleh DPRD tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pengendalian saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Akan tetapi harus dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan terhadap pelaksanaan (*Policy*) yang digariskan bukan pemeriksaan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan ombudsmen yang berfungsi sebagai pengawas independen

untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi (Darise, 2009)

Pelaksanaan anggaran setelah adanya persetujuan dari pihak legislatif. Dalam tahap ini, pelaksanaan anggaran hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh pengguna anggaran publik adalah mempersiapkan dan memiliki sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen (Darise, 2007).

Anggaran merupakan alat pengendalian (*Control Tool*). Mardiasmo (2009) menjelaskan sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek untuk diteliti adalah pengaruh perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD yang berperan pada pembangunan daerah.

Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah kinerja SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan program kegiatan yang berbasis kepada anggaran. Dalam hal ini penulis akan melihat tingkat capaian kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran pada masing-masing SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjumlah 35 SKPD. Sampel penelitian

ini dilakukan dengan cara *Multi Stage Sampling* berjumlah 32 SKPD.

Jenis data ada dua, primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang di peroleh atau di kumpulkan dari penyebaran kuesioner penelitian, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran terhadap kinerja pada SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan dan telaah dokumentasi yang berhubungan dengan data perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran terhadap kinerja pada SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan dan dokumentasi diantaranya dokumen RPJM, RKPD, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk memperoleh data secara langsung, dilakukan penyebaran kuesioner pada Pegawai Negeri Sipil di SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang terdiri dari empat bentuk kuesioner untuk mengukur variabel kinerja SKPD, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan anggaran. Selanjutnya untuk mengetahui pertanyaan yang valid dan juga dilakukan pengujian kuesioner. Teknik pengumpulan data yang kedua digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan mengadakan telaah hasil penelitian. Selanjutnya data penelitian yang di peroleh tersebut di kumpulkan, kemudian di tabulasi guna mempermudah pengolahan dan analisis selanjutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Skor rata-rata variabel kinerja SKPD untuk masing-masing indikator. Indikator pertama masukan mempunyai skor rata-rata 4.68 dengan tingkat capaian responden sebesar 93.50%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator pertama (masukan) berada

pada kategori sangat baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai indikator masukan sangat berjalan dengan baik.

Indikator kedua, keluaran skor rata-rata 4.42 dengan tingkat capaian responden 88.37%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator kedua berada pada kriteria baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa kinerja SKPD dilihat dari aspek keluaran termasuk kategori baik. Indikator ketiga, manfaat skor rata-rata 4.35 dengan tingkat capaian responden 86.88%. Nilai ini menunjukan bahwa indikator ketiga berada pada kategori baik. Ini mengindikasikan bahwa kinerja SKPD dilihat dari aspek manfaat dengan kategori baik.

Indikator keempat dampak, dengan skor rata-rata 4,53 dengan tingkat capaian responden 90,75% termasuk kategori sangat baik. Nilai ini mengindikasikan bahwa kinerja SKPD dari aspek dampak dengan kategori sangat baik.

Skor rata-rata variabel perencanaan untuk masing-masing indikator. Indikator pertama, proses merumuskan tujuan skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 50,02 dengan tingkat capaian responden sebesar 38,52%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator pertama, merumuskan tujuan berada pada kriteria kurang baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa merumuskan tujuan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berjalan dengan baik. Perencanaan dalam merumuskan tujuan kinerja SKPD sudah mengacu kepada peraturan yang berlaku namun belum dilakukan secara sistim pengendalian intern (SPI) oleh SKPD sehingga pelaksanaan kinerja SKPD banyak ditemukan kesalahan.

Indikator kedua, proses merencanakan program dan kegiatan skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,23 dengan tingkat capaian responden sebesar 84,75%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator kedua proses merencanakan program dan kegiatan berada pada kriteria

baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa proses merencanakan program dan kegiatan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Indikator ketiga, proses mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,21 dengan tingkat capaian responden sebesar 84,22%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator ketiga proses mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun berada pada kriteria baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa proses mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Indikator keempat, proses menentukan tingkat pencapaian strategi skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,12 dengan tingkat capaian responden sebesar 82,29%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator keempat proses menentukan tingkat pencapaian strategi berada pada kriteria baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa proses menentukan tingkat pencapaian strategi pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Skor rata-rata variabel penatausahaan untuk masing-masing indikator. Indikator pertama, proses mempersiapkan anggaran skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 3,79 dengan tingkat capaian responden sebesar 75,78%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator pertama pelaksanaan anggaran berada pada kriteria cukup baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa proses pelaksanaan anggaran pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian telah dikerjakan dengan cukup baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator kedua, proses sistim informasi akuntansi skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 3,18 dengan tingkat capaian responden sebesar 63,56%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator kedua sistim informasi akuntansi berada pada kriteria cukup baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa proses sistim informasi akuntansi pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan cukup optimal walaupun belum maksimal.

Indikator ketiga, proses sistim pengendalian manajemen skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 2,89 dengan tingkat capaian responden sebesar 57,71%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator ketiga sistim pengendalian manajemen berada pada kriteria kurang baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa proses sistim pengendalian manajemen pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berjalan secara optimal.

Skor rata-rata variabel pengendalian anggaran untuk masing-masing indikator. Indikator pertama, proses membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang di anggarakan skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,4 dengan tingkat capaian responden sebesar 87,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator pertama proses membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang di anggarakan berada pada kriteria baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa pengendalian anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Indikator kedua, proses menghitung selisih anggaran skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,37 dengan tingkat capaian responden sebesar 87,50%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator kedua proses

menghitung selisih anggaran berada pada kriteria baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa pengendalian anggaran pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan optimal.

Indikator ketiga, proses menentukan penyebab yang dapat dikendalikan suatu variance skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 4,0 dengan tingkat capaian responden sebesar 81,40%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator ketiga proses menentukan penyebab yang dapat dikendalikan suatu variance berada pada kriteria baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa pengendalian anggaran pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah berjalan optimal.

Indikator keempat, proses merevisi standar biaya atau target anggaran skor rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 2,9 dengan tingkat capaian responden sebesar 59,12%. Nilai ini menunjukkan bahwa indikator keempat proses merevisi standar biaya atau target anggaran berada pada kriteria kurang baik. Dengan demikian kriteria ini mengindikasikan bahwa pengendalian anggaran pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berjalan secara optimal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh informasi bahwa ketiga variabel exogen yang telah digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen. Dari hasil analisis data penelitian dapat diketahui, bahwa variabel exogen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran mempunyai pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD sebagai variabel endogen. Hal ini didukung oleh rata-rata skor dan tingkat pencapaian rata-rata skor keempat variabel termasuk dalam kategori baik. Pembahasan hasil pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berkaitan dengan hipotesis pertama, diperoleh informasi variabel perencanaan berpengaruh secara signifikan

dan positif terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini didukung hasil analisis jalur antara variabel perencanaan terhadap pelaksanaan yang menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pelaksanaan anggaran. Dengan demikian peningkatan kualitas perencanaan akan diikuti pula peningkatan pelaksanaan anggaran SKPD yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Temuan di atas sesuai dengan temuan Solikin bahwa kegagalan-kegagalan perencanaan yang dapat mempersulit pelaksanaan anggaran, yang mana akibat perencanaan yang tidak jelas dan tidak realistis mengakibatkan ketidakjelasan pelaksanaan anggaran. Pemahaman yang kurang terhadap teknik perencanaan meningkatkan peluang terjadinya keraguan dalam proses perencanaan anggaran.

Menurut Mardiasmo (2002) lemahnya perencanaan anggaran yang diikuti ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang tidak baik juga akan memperburuk pelaksanaan anggaran baik dalam proses penatausahaan keuangan maupun dalam pelaporan. Hal ini juga ditentukan dalam penelitian ini yang mana proses perencanaan yang dipengaruhi oleh faktor politik dan bukan faktor kebutuhan riil akan proses pelaksanaan anggaran kinerja. Temuan ini dapat dimaklumi karena perencanaan yang dilakukan umumnya tidak sesuai dengan realita sehingga pihak SKPD dan pengambilan kebijakan akan mencari kebenaran atas apa yang mereka lakukan, sehingga mereka akan merasakan kesulitan dalam pertanggungjawaban. Lebih lanjut Mardiasmo (2002) menyatakan kinerja SKPD daerah harus bertumpu pada kepentingan publik bukan atas tekanan politik. Hal ini harus terlihat pada porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik dan besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan

informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian perencanaan anggaran yang sesuai dengan sistem informasi keuangan daerah akan mempermudah proses pelaksanaan dan pengendaliannya.

Temuan di atas sesuai dengan penelitian Kherlani (2006) bahwa pelaksanaan dan penganggaran berpengaruh terhadap efektivitas penyempurnaan penatausahaan keuangan. Meskipun variabel perencanaan tidak terbukti mempengaruhi proses perencanaan keuangan publik, sehingga faktor internal (kebijaksanaan) tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan di atas diperkuat dengan rata-rata skor tingkat capaian responden (TCR) perencanaan anggaran yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini berarti bahwa proses perencanaan dan proses pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara umum termasuk dalam kategori baik. Namun masih ditemukan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan baik pada proses perencanaan maupun proses pelaksanaan. Pada proses perencanaan yang perlu ditingkatkan adalah (1) perencanaan yang tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik, (2) perencanaan pembangunan pada tingkat desa dan kecamatan dibuat tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat. Apabila kedua hal ini dapat diperbaiki maka perencanaan anggaran akan semakin baik dan penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai hasil yang semakin baik pula.

Kedua, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan berkaitan hipotesis kedua diperoleh informasi bahwa variabel perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengendalian anggaran. Dari hasil analisis juga ditemukan adanya pengaruh langsung perencanaan dan pelaksanaan terhadap pengendalian anggaran.

Temuan di atas sesuai dengan pendapat Nasution (2004) bahwa perencanaan anggaran yang baik akan dapat memenuhi kebutuhan untuk anggaran berbasis kinerja yang akan mempermudah pelaksanaan penatausahaan keuangan publik dan juga akan lebih meningkatkan pengendalian instansi yang bersangkutan. Dengan demikian semakin baik perencanaan dan pelaksanaan akan meningkatkan pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD. Temuan tersebut sesuai dengan *International Monetary Fund* (IMF) dalam Schiavo-Campo and Tomasi (1999) sebagaimana dikutip Mardiasmo (2006) bahwa pengendalian anggaran yang transparan dapat dilakukan salah satunya apabila ada proses perencanaan fiskal dan penganggaran yang baik akan mendorong tercapainya pengendalian anggaran yang baik.

Mardiasmo (2002) juga mengatakan bahwa perencanaan anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dengan demikian perencanaan anggaran yang baik akan bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, karena outputnya benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan adanya manfaat yang baik aparatur akan lebih mudah mempertanggungjawabkan kewajibannya.

Umar (2001) menyatakan bahwa pertanggungjawaban adalah tahap terakhir dari satu siklus pengelolaan keuangan sehingga dapat terlihat sejauh mana perencanaan anggaran dilaksanakan sesuai target (tercapai) atau terlampaui. Dengan adanya pertanggungjawaban atas kewajiban maka para perencana anggaran harus merencanakan dengan sebaik-baiknya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wasistiono (2001) bahwa untuk mempertanggungjawabkan perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dalam LAKIP akan di nilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan suatu instansi dalam menjalankan

kewajiban. Laporan memuat akuntabilitas kegiatan yang dilakukan instansi sesuai fungsi AKIP untuk mendorong terciptanya pengendalian anggaran instansi pemerintah. Dengan adanya tuntutan tersebut maka para perencana, pelaksana dan pengendalian anggaran berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan kinerja SKPD yang dimaksud. Dengan demikian proses pelaksanaan anggaran oleh SKPD di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih perlu ditingkatkan agar tercapainya pengendalian anggaran yang baik, terhadap kinerja SKPD.

Temuan di atas didukung hasil analisis yang menunjukkan bahwa rata-rata skor TCR variabel pengendalian anggaran termasuk dalam kategori baik. Pencapaian masing-masing indikator menunjukkan bahwa skor tingkat pencapaian pada kedua indikator baik. Pencapaian masing-masing indikator menunjukkan bahwa skor tingkat capaian pada kedua indikator tersebut berada pada kategori baik, dan satu indikator yaitu pelaksanaan masih termasuk dalam kategori cukup baik. Meskipun pengendalian telah termasuk dalam kategori baik, namun masih perlu adanya peningkatan proses perencanaan dan pelaksanaan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai hasil yang semakin baik.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis ketiga diperoleh informasi bahwa variabel perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari hasil analisis juga ditemukan adanya pengaruh langsung dan tidak langsung dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari ketiga variabel exogen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja SKPD yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran ditemukan juga pengaruh langsung perencanaan lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung. Hal ini diduga disebabkan pengaruh perencanaan terhadap pelaksanaan

dan pengaruh pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD lebih kecil dibanding pengaruh langsung perencanaan terhadap kinerja SKPD. Hal ini mengakibatkan pengaruh tidak langsung perencanaan terhadap kinerja SKPD menjadi kecil.

Variabel pelaksanaan berpengaruh terhadap kinerja SKPD yang mana pengaruh langsung lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung. Hal ini diduga juga disebabkan oleh rendahnya pengaruh pelaksanaan terhadap pengendalian anggaran dan pengaruh pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD. Hal ini mengakibatkan pengaruh tidak langsung pelaksanaan terhadap kinerja SKPD menjadi kecil.

Pengaruh variabel pengendalian anggaran lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh variabel perencanaan terhadap kinerja SKPD. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan mempunyai pengaruh yang sangat baik terhadap Kinerja SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa kinerja SKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Meskipun pelaksanaan dan pengendalian anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Temuan di atas sesuai dengan pendapat Moekijat (1980 : 422) dan diperkuat oleh Conyers dan Hills (dalam Arsyad, 1999 : 19) bahwa perencanaan yang baik akan menentukan tingkat pencapaian tujuan yang akan datang. Berarti baik atau tidak baiknya perencanaan anggaran akan menentukan kinerja SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 bahwa indikator kinerja SKPD dapat dilihat dari efektivitas keluaran (*output*) dalam mencapai tujuan perencanaan anggaran. Di dalam analisis kinerja keuangan akan dibandingkan rencana anggaran dan tujuan yang dicapai. Dengan demikian semakin baik perencanaan anggaran akan semakin baik kinerja SKPD.

Pendapat di atas juga didukung oleh Mardiasmo (2005 : 61) bahwa perencanaan

anggaran menjadi sangat penting karena ketidak tepatan dan ketidak efektifan perencanaan anggaran akan dapat menggagalkan pencapaian tujuan, sehingga kinerja SKPD akan rendah atau tidak baik.

Berdasarkan temuan di atas variabel pengendalian anggaran masih termasuk dalam kategori kecil dalam mempengaruhi kinerja SKPD. Hal ini diduga disebabkan (1) belum ada kemampuan politik untuk melakukan pengendalian, (2) belum adanya iklim kompetisi di antara institusi pemerintah yang menjalankan kegiatan sejenis, (3) belum tersedia standar atau tolak ukur yang disepakati bersama di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditinjau dari analisis jalur, pengaruh langsung dari pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD. Berdasarkan hasil di atas berarti peningkatan pengendalian anggaran mempunyai pengaruh langsung yang lebih besar kepada kinerja SKPD dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung pelaksanaan terhadap kinerja SKPD melalui pengendalian anggaran. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan anggaran akan berpengaruh terhadap kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Berdasarkan hasil analisis jalur ditemukan pengaruh langsung dari pengendalian anggaran terhadap kinerja SKPD. Dengan demikian peningkatan kualitas pengendalian anggaran kinerja SKPD akan diikuti pula peningkatan kinerja SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Temuan di atas mengisyaratkan perlunya kinerja SKPD yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian proses pelaksanaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya pengendalian anggaran, pengendalian hukum, pengendalian untuk efisiensi dalam operasional harus dapat dipertanggungjawabkan dan pengendalian hasil atau laporan pertanggungjawaban yang akuntabel akan mendorong terhadap perbaikan kinerja SKPD. Hal ini didukung oleh pendapat Cavaluzzo dan Ittner (2003)

menyatakan pengembangan ukuran kinerja tanpa meningkatkan pengendalian pelaporan hanya akan berfungsi simbolis, tidak ada pengaruhnya bagi perbaikan kinerja internal dalam pengambilan keputusan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil analisis diatas ditemukan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti terhadap kinerja SKPD yang lebih besar dari pengaruh ketiga variabel yang diteliti. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian pihak terkait untuk memperhatikan variabel lain selain ketiga variabel dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja SKPD di pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Diduga beberapa variabel lain itu di antaranya kondisi keuangan daerah, kemampuan sumber daya manusia yang masih belum memenuhi standar baik pengetahuan dan pengalaman kerja, motivasi aparatur daerah yang masih rendah, partisipasi masyarakat yang masih rendah, rendahnya pembinaan atasan terhadap bawahan dan lain-lain yang masih perlu dikaji lebih mendalam.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pelaksanaan anggaran yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengendalian anggaran kinerja SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perencanaan anggaran mempunyai pengaruh paling besar terhadap kinerja SKPD. Dari pengaruh tersebut, pengaruh langsung perencanaan anggaran lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung. Hal ini diduga disebabkan pengaruh pengendalian

anggaran terhadap kinerja SKPD lebih kecil dibanding pengaruh langsung perencanaan anggaran terhadap kinerja SKPD. Hal ini mengakibatkan pengaruh tidak langsung perencanaan anggaran terhadap kinerja SKPD menjadi kecil.

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada SKPD lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas sehingga semua kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Berry L.M, and J.P. Houton (1993). *Psychology at Work*, Wm. C. Brown, Communication, England Oxford Inc.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta.

Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan